



# Kajian ekonomi dan kebijakan pengelolaan Pulau Lirang, Maluku Barat Daya, Indonesia



## Economic studies and management policies of Lirang Island, Southwest Moluccas, Indonesia

Femsky Kour

Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Sains, Teknologi dan Kesehatan, Universitas Hein Namotemo, Jln. Kompleks Pemerintahan Vak-1, Tobelo, 97762

### Info Artikel:

Diterima: 27 Nopember 2017

Revisi: 23 Desember 2017

Disetujui: 25 April 2018

Dipublikasi: 28 Mei 2018

### Keyword:

Economic;  
Border area;  
Policy;

**ABSTRAK.** Di kawasan perbatasan Pulau Lirang, sulitnya aksesibilitas memunculkan kecenderungan masyarakat khususnya nelayan untuk berinteraksi dengan masyarakat di Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu pengelolaan dan pengembangan pulau-pulau kecil yang tepat sesuai dengan potensi, karakteristik, dan permasalahan yang dimiliki daerah tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis kondisi ekonomi masyarakat Pulau Lirang menggunakan metode Analisis Tukar Nelayan (NTN), menganalisis kebijakan pengembangan kawasan perbatasan, serta merumuskan strategi pengembangan Pulau Lirang menggunakan metode Analisis Kebijakan Publik dan Analisis SWOT. Secara umum nelayan Lirang yang adalah nelayan perbatasan memiliki distribusi NTN di atas angka satu, dan dapat disimpulkan bahwa nelayan mempunyai tingkat kesejahteraan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan subsistennya. Beberapa kebijakan yang turut mendukung pengembangan Pulau Lirang sebagai Pulau kecil perbatasan antara lain: meningkatkan kemandirian nelayan melalui dukungan sarana prasarana penangkapan ikan (pasar, dermaga/jeti, pangkalan pendaratan ikan (PPI), pabrik es, cold storage dan air bersih dalam menunjang proses dan kelancaran usaha perikanan tangkap) dan pelatihan-pelatihan bagi nelayan melalui pembinaan, magang, guna meningkatkan ketrampilan dan penguasaan teknologi dalam rangka pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang tersedia; meningkatkan kerjasama di bidang sosial dan ekonomi, dengan RDTL.

**ABSTRACT.** In Lirang Island's border the fisherman was interact with Republic of Timor Leste Democratic because of difficult accessibility. Therefore, management and development of small islands were needed which fit with its potential, characteristic, and problems. The aim of this research were to analyze economic condition of Lirang's people using fishing rate analysis; to analyze policy of border and formalize the strategic of development Lirang's Island using public policy analysis and SWOT Analysis. Commonly, Lirang's fisherman has fishing rate above 1 and it showed that they have well-being level to fulfill their need. A few policies that support the development of Lirang's island as small island were: to improve their autonomy from fishing facilities and infrastructure (market, dock/jetty, base of landing base, ice factory, cold storage and water) and training for fisherman through founding, to improve their skills and control the technology; to improve the social and economic collaboration with Republic of Timor Leste Democratic.

### Korespondensi:

Femsky Kour  
Program Studi Teknologi Hasil  
Perikanan, Fakultas Sains,  
Teknologi dan Kesehatan,  
Universitas Hein Namotemo,  
Jln. Kompleks Pemerintahan  
Vak-1, Tobelo, 97762,  
Email: [kourfemsky@gmail.com](mailto:kourfemsky@gmail.com)

Copyright© Mei 2018 Kour, F.

Under Licence a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## 1. Pendahuluan

Kehidupan ekonomi di daerah perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan di Negara tetangga. Daerah perbatasan dan pulau kecil merupakan daerah tertinggal (terbelakang) disebabkan antara lain: 1) Lokasinya yang relatif terisolir dengan tingkat aksesibilitas yang rendah; 2) Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat; 3) Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal); 4) Langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masyarakat di daerah perbatasan; 5) Rendahnya infrastruktur wilayah (Nugroho, 2012).

Infrastruktur wilayah di pulau Lirang terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumberdaya air dan

irigasi, listrik, telekomunikasi serta sarana dan prasarana permukiman. Menurut penelitian sebelumnya (Far-far, 2010) infrastruktur transportasi darat meliputi (jalan, jembatan dan angkutan penyeberangan), dan transportasi laut (kapal, pelabuhan) di pulau Lirang, masih sangat terbatas. Jenis jalan yang berkerikil di Pulau Lirang (6 km), jenis jalan tanah (4 km), dan jenis jalan aspal yg menghubungkan Ustutun dengan Manoha (1 km). Transportasi laut yang melayani hubungan antar pulau Lirang dan Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten adalah kapal-kapal perintis dengan ukuran 425 GT, kapal-kapal pelayaran nusantara yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun perseorangan. Rendahnya pelayanan infrakstruktur di pulau Lirang merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka memperpendek rentang kendali, meningkatkan aksesibilitas dan mobilisasi manusia dan barang

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pulau Lirang.

Visi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) adalah terwujudnya tata kelola batas Negara dan kawasan perbatasan yang aman, tertib, maju dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nugroho, 2012).

Pulau Lirang terletak di sebelah barat Pulau Wetar dengan batas wilayah yaitu sebelah barat berbatasan dengan Kepulauan Alor Propinsi NTT, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wetar, sebelah utara berbatasan dengan laut Banda, sebelah selatan berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste. Pulau Lirang merupakan kawasan perbatasan yang pantas mendapat perhatian penuh oleh pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat pulau Lirang perlu difasilitasi dengan kegiatan pengembangan pada masyarakat, khususnya nelayan berupa pelatihan-pelatihan dalam bidang perikanan dan pengembangan infrastruktur sebagai unsur pendukung peningkatan kualitas SDM.

Kondisi-kondisi yang dikemukakan di atas menjadi hal menarik untuk dikaji, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lirang dengan melihat kondisi ekonomi dan kebijakan pengembangan pada kawasan perbatasan Lirang dan merumuskan strategi pengelolaan dan pengembangan Pulau Lirang sebagai pulau kecil perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi ekonomi masyarakat Pulau Lirang; menganalisis kebijakan pengembangan kawasan perbatasan pulau Lirang; merumuskan strategi pengembangan Pulau Lirang sebagai pulau kecil perbatasan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perencanaan pengelolaan dan pengembangan wilayah perbatasan di Maluku Barat Daya secara komprehensif.

## 2. Bahan dan Metode

### 2.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan di Pulau Lirang dan Pulau Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya, pada bulan April hingga Juni 2013 (**Gambar 1**).

### 2.2. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain daftar pertanyaan atau kuesioner untuk pengumpulan data umum pulau Lirang. Beberapa kelengkapan instrumen

pendukung untuk kepentingan pengumpulan data di lapangan antara lain: alat tulis menulis dan juga peralatan pendokumentasian kegiatan pengumpulan data baik dokumentasi gambar maupun perekaman suara pada saat diskusi dan tanya jawab dengan responden.

## 2.3. Teknik Pengumpulan Data

### 2.3.1. Observasi lapangan

Observasi lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap fakta yang terjadi di lapangan. Tujuan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat pulau Lirang, dan masalah-masalah yang terjadi di kawasan perbatasan. Data primer yang diperoleh dari lapangan antara lain: ekonomi masyarakat nelayan (pendapatan perikanan, pendapatan non perikanan, pengeluaran nelayan per bulan). Data dan informasi dari instansi-instansi terkait misalnya LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja, Instansi Pemerintah), jumlah penduduk dan ketenagakerjaan, pendidikan dan kesehatan, data base DKP, dan RPJMD.

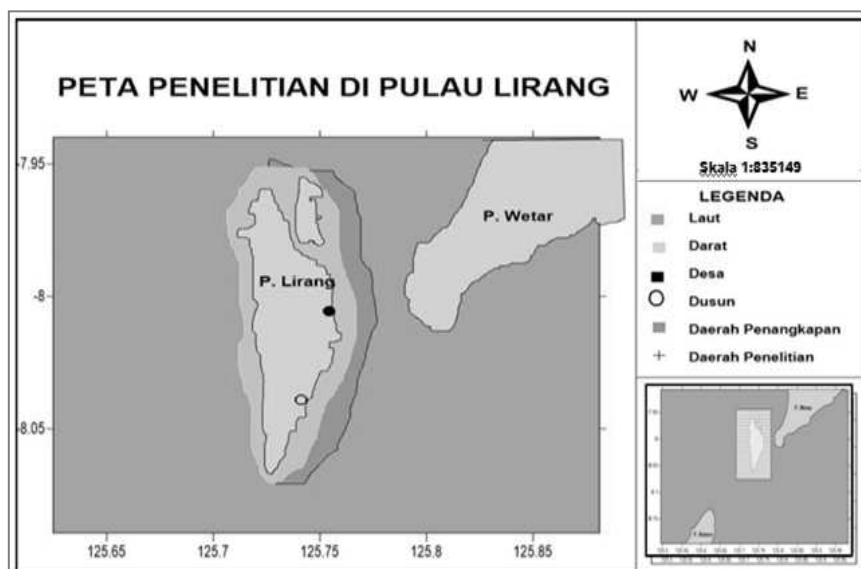
### 2.3.2. Wawancara

Kegiatan wawancara dilakukan pada responden pemerintah dan masyarakat nelayan. Responden pemerintah dengan alasan perspektif kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis menunjukkan peran pemerintah yang masih mendominasi perkembangan wilayah perbatasan. Responden nelayan yaitu diskusi terfokus untuk 40 nelayan (20 orang per desa per dusun).

## 2.4. Analisis Data

### 2.4.1. Nilai tukar nelayan (NTN)

Konsep nilai tukar yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan. Jika NTN lebih kecil dari satu, ini berarti keluarga nelayan mempunyai daya beli lebih rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan berpotensi untuk mengalami defisit anggaran rumah tangganya. Jika NTN berada disekitar angka satu berarti keluarga nelayan hanya mampu mencukupi kebutuhan subsistennya. Jika NTN berada di atas angka satu berarti keluarga nelayan mempunyai tingkat kesejahteraan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan subsistennya dan mempunyai potensi untuk mengkonsumsi



**Gambar 1.** Peta lokasi penelitian.

**Tabel 1.** Jenis dan tingkat pengeluaran masyarakat nelayan Lirang per jenis kebutuhan ekonomi per bulan.

Tingkat Pengeluaran	Pendidikan Anak	Konsumsi Keluarga	Biaya Kesehatan	Tanggungjawab Lain-lain	Jumlah Pengeluaran (Rp)
Minimum	5.000	4.000	0	15.000	24.000
Maksimum	235.000	216.000	20.000	120.000	591.000
Rata-rata	120.000	110.000	10.000	67.500	307.500

Sumber: data primer

kebutuhan sekunder atau tersiernya atau menabung dalam bentuk investasi barang. Menurut Ustriyana (2006), NTN dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NTN = Y_t/E_t$$

$$E_t = EFT + EK$$

Keterangan: YFt: Total penerimaan nelayan dari usaha perikanan (Rp); YNFt: Total penerimaan non nelayan perikanan (Rp); EFT: Total pengeluaran nelayan untuk konsumsi ke nelayan (Rp); dan T: Periode waktu (bulan, tahun)

#### 2.4.2. Analisis kebijakan publik

Kebijakan pengembangan kawasan perbatasan Lirang dapat dianalisis dengan kebijakan publik Dunn (2003). Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn adalah sebagai berikut.

#### 2.4.3. Analisis kebijakan publik

Berbagai persoalan yang ditemui di lokasi penelitian, akan di analisis menggunakan analisis SWOT untuk mendapatkan gambaran dalam rangka merumuskan strategi pengembangan kawasan perbatasan. Beberapa penyesuaian dalam pembentukan model analisisnya menurut Rangkuti (2006) yaitu:

- Pembobotan tetap menggunakan skala 1 (sangat penting) hingga 0 (tidak penting), akan tetapi penilaian skala untuk masing-masing situasi total berjumlah 1 dengan cara:
  - Urutkan faktor situasi berdasarkan skala prioritas (SP) (tertinggi nilainya 16 dari 4x4, urutan 2 nilainya 12 dari 3x4, dan terendah nilai 4 dari 1x4 lalu dikalikan dengan konstanta (K) nilai tertinggi yaitu 4.
  - Masing-masing nilai situasi tersebut di bagi dengan total nilai SPxK.
- Peringkat tetap menggunakan skala 1 (rendah) sampai 4 (tinggi) untuk kekuatan dan peluang, sedangkan skala 4 (rendah) sampai 1 (tinggi) untuk kelemahan dan ancaman.
- Nilai tertinggi dari bobot kali peringkat adalah 1-2 (kuat) dan 0-1 (lemah).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Di kawasan perbatasan Pulau Lirang, sulitnya aksesibilitas memunculkan kecenderungan masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat di Negara RTDL. Minimnya aksesibilitas dari dan keluar kawasan perbatasan wilayah merupakan salah satu faktor yang turut mendorong orientasi masyarakat yang cenderung berkiblat aktifitas sosial ekonominya ke Negara tetangga yang secara jangka panjang dikhawatirkan akan memunculkan degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan.

##### 3.1.1. Tingkat kebutuhan ekonomi nelayan

Untuk mendalami faktor-faktor ekonomi yang berlaku dalam masyarakat di pulau Lirang, maka salah satu faktor penting untuk diungkap ialah tingkat kebutuhan ekonomi. Tingkat kebutuhan ekonomi yang dipelajari di tingkat masyarakat ialah pada level masyarakat nelayan. Berdasarkan

hasil wawancara dengan nelayan menunjukkan adanya tiga parameter pengeluaran masyarakat nelayan yang utama, antara lain: (1) biaya pendidikan anak (2) konsumsi keluarga dan (3) biaya kesehatan. Walaupun demikian ada tanggungan lain yang turut memberikan pengaruh terhadap tingkat kebutuhan ekonomi nelayan (Tabel 1).

#### 3.1.2. Orientasi pasar

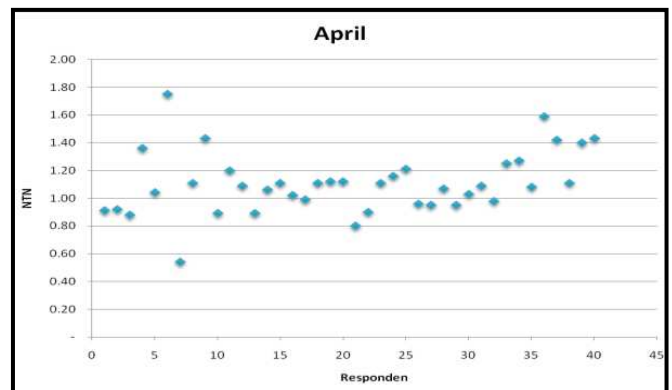
Pada umumnya daerah pebatasan belum mendapat perhatian secara proporsional. Kondisi ini terbukti dari kurangnya sarana prasarana wilayah perbatasan dan aparat keamanan di perbatasan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti, perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang dan jasa serta kejahatan trans-nasional.

Kecenderungan nelayan untuk menjual hasil tangkapan ke Timor Leste (Atauro dan Dili) disebabkan karena infrastruktur pasar yang kurang memadai. Pasar yang terdapat di desa Ustutun baru difungsikan akhir Juni 2013, tetapi hanya diperuntukkan bagi penjualan hasil kebun (ubi jalar, ubi kayu, kacang-kacangan dan sayur-sayuran). Sedangkan penjualan hasil tangkapan ikan dijual pada tempat-tempat pendaratan ikan, dalam bentuk barter. Transaksi ini terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain: (1). Jarak Lirang-Atauro 4 mil laut dan dapat dijangkau dengan perahu bermotor dan perahu layar dengan lama perjalanan 1-2 jam; (2). Hubungan emosional masyarakat Lirang dengan Atauro; (3). Kepentingan di bidang ekonomi. Sejak pemekaran kecamatan Wetar Barat, pemerintah kecamatan sedang berupaya untuk menghentikan transaksi ini karena dinyatakan ilegal. Transaksi ini bisa diputuskan jika pemerintah daerah menyiapkan pengusaha lokal untuk penanganan hasil tangkapan yang lebih baik. Kondisi perekonomian yang dialami oleh masyarakat Lirang, sampai saat ini belum terjadi kepincangan keamanan di Lirang yang mengakibatkan nelayan beralih ke Timor Leste.

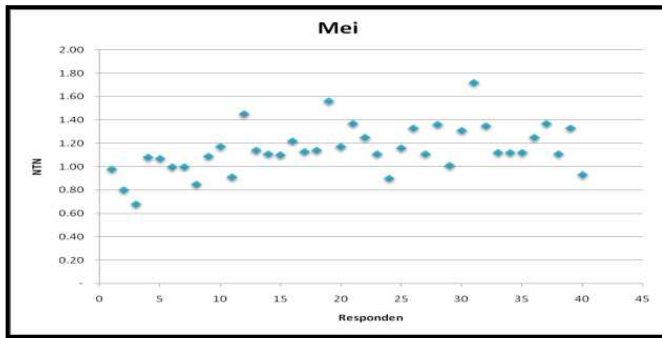
#### 3.1.3. Tingkat kesejahteraan nelayan

##### 3.1.3.1. Nilai tukar nelayan (NTN)

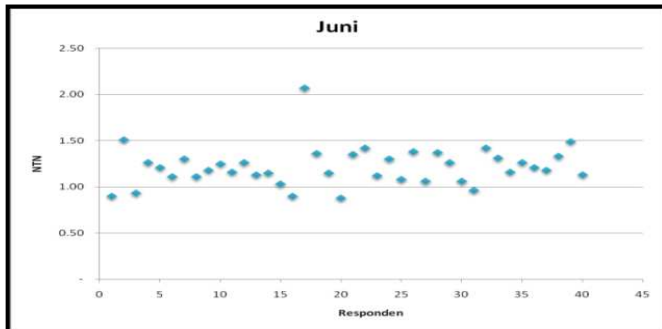
Pada pembahasan tingkat kesejahteraan nelayan di Pulau Lirang akan dihitung NTN dari bulan April (Gambar 2), Mei (Gambar 3), dan Juni (Gambar 4). Perhitungan NTN dibahas berdasarkan responden nelayan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan pada responden (Gambar 5).



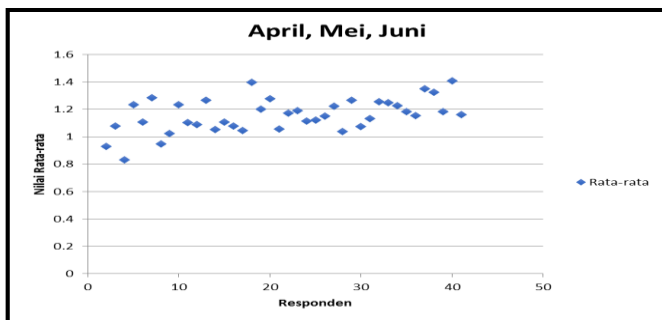
**Gambar 2.** Distribusi Nilai Tukar Nelayan (NTN) nelayan Pulau Lirang pada bulan April.



Gambar 3. Distribusi Nilai Tukar Nelayan (NTN) nelayan Pulau Lirang pada bulan Mei.



Gambar 4. Distribusi Nilai Tukar Nelayan (NTN) nelayan Pulau Lirang pada bulan Mei.



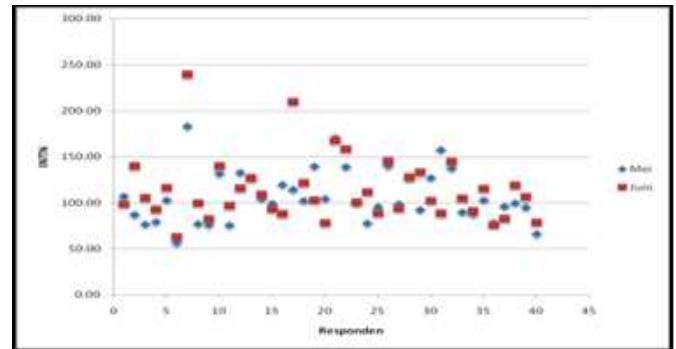
Gambar 5. Distribusi Nilai Tukar Nelayan (NTN) nelayan Pulau Lirang rata-rata per bulan selama penelitian.

Distribusi NTN pada bulan April, Mei dan Juni bervariasi antar nelayan. NTN tertinggi diperoleh nelayan pada bulan Juni sebesar 2,07 dan terendah pada bulan April sebesar 0,54. Sedangkan rata-rata NTN tertinggi yang diperoleh nelayan sebesar 1,40 sedangkan terendah sebesar 0,83. Hasil ini membuktikan bahwa rata-rata NTN pada bulan April, Mei dan Juni di atas angka satu.

Secara umum nelayan Lirang memiliki distribusi NTN di atas angka satu, artinya nelayan mempunyai tingkat kesejahteraan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan subsistennya dan mempunyai potensi untuk mengkonsumsi kebutuhan sekunder atau tersiernya, atau menabung dalam bentuk investasi barang. Nelayan yang memiliki NTN di bawah satu adalah keluarga nelayan yang mempunyai daya beli lebih rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan berpotensi untuk mengalami defisit anggaran rumah tangganya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan nelayan memiliki NTN yang rendah adalah sarana prasarana tangkap yang terbatas, sehingga jangkauan daerah penangkapan ikan tidak terlalu jauh, orientasi pasar yang hanya tergantung pada nelayan Timor Leste, dan nelayan tidak fokus untuk satu pekerjaan mengakibatkan pendapatan nelayan sulit diprediksi.

### 3.1.3.2. Indeks nilai tukar nelayan (INTN)

Berdasarkan hasil analisis indeks nilai tukar nelayan terlihat bervariasi. INTN dapat dilihat dari bulan Mei, dan Juni sedangkan bulan April dijadikan sebagai bulan dasar.



Gambar 3. Indeks Nilai Tukar Nelayan (INTN) di Pulau Lirang selama penelitian

Distribusi INTN yang cenderung meningkat dan menurun, disebabkan karena penghasilan semua nelayan tidak sama dan waktu penangkapan yang berbeda-beda, sehingga hasil tangkapan dan pendapatan nelayan berbeda.

Adrian *et al.* (2014) menyatakan bahwa indeks yang diterima oleh nelayan sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu harga dan produksi. Dinamika harga pada perikanan tangkap laut tidak dapat dipisahkan dari besarnya produksi yang dihasilkan. Ketika produksi ikan sedang berlimpah, seringkali harga ikan mengalami penurunan dan begitupula sebaliknya. Faktor lain diantaranya adalah kondisi cuaca yang kurang baik dan sumber daya ikan yang masih langka.

## 3.2. Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur perekonomian di Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari fasilitas perdagangan dan jasa. Sarana perdagangan diperlukan untuk menunjang aktifitas ekonomi masyarakat baik itu sebagai media transaksi kebutuhan antar berbagai pihak maupun sebagai fasilitas koleksi dan distribusi komoditi produksi kegiatan ekonomi. Fasilitas perdagangan di pulau Lirang masih berskala kecil. Hal ini mengakibatkan harga barang mengalami peningkatan dibandingkan dengan wilayah lain yang memiliki fasilitas perdagangan yang berskala besar. Hasil identifikasi lapangan menunjukkan bahwa sarana perekonomian di Pulau Lirang, hanya terbatas pada satu unit pasar. Kegiatan ekonomi skala kecil atau di tingkat rumah tangga hanya didukung dengan eksistensi 12 unit kios. Kondisi ini menunjukkan adanya suatu kondisi yang berbeda dengan wilayah lain di sekitar Pulau Lirang. Far-far, 2010 menyatakan bahwa hal ini yang sering kali menyebabkan adanya ketimpangan layanan ekonomi wilayah. Ketimpangan layanan infrastruktur dan utilitas ekonomi antar wilayah berakibat pada tidak berkembangnya daya saing antar wilayah, kurangnya pemerataan pembangunan sarana prasarana berpengaruh pada distribusi sumberdaya yang tidak seimbang dan terhambatnya pengembangan ekonomi unggulan.

### 3.2.1. Sarana komunikasi

Sarana telekomunikasi yang biasa digunakan masyarakat Lirang adalah ratelda (satu unit). Akibat keterbatasan sarana komunikasi, masyarakat Pulau Lirang sering memilih jaringan komunikasi alternatif pada Negara tetangga Timor Leste. Pemenuhan komunikasi ini juga membutuhkan energi yang cukup besar, di mana untuk mengakses jaringan komunikasi melalui signal yang tersedia, masyarakat yang memiliki telepon genggam harus menjangkau lokasi sekitar 7 km dari pusat

pemukiman. Terkait dengan upaya-upaya mengatasi keterbatasan seperti ini, dalam tahun 2013, pemerintah telah berupaya membangun pemancar seluler dan mulai difungsikan pada akhir bulan November tahun 2013.

### 3.2.2. Sarana kelistrikan

Masyarakat di Pulau Lirang sampai saat ini masih menggunakan sumber listrik tenaga surya (LTS). Sumber listrik lainnya yang diakses oleh masyarakat Pulau Lirang melalui penggunaan generator. Hasil identifikasi lapangan menunjukkan hanya sebanyak 17 kepala keluarga yang menggunakan genset sebagai sumber listrik.

Eksistensi genset sebagai salah satu sumber listrik merupakan usaha individual yang dilakukan oleh setiap rumah tangga yang memiliki kemampuan untuk pengadaan alat ini. Keluarga-keluarga tertentu di pulau Lirang yang mampu mengadakan genset adalah keluarga-keluarga nelayan yang

alang-alang atau daun kelapa, dan atap rumah juga terbuat dari rumput alang-alang dan daun kelapa. Kondisi perumahan seperti ini menjadi salah satu indikator dari kondisi ekonomi masyarakat di sana. Tingkat pendapatan dan akses ekonomi yang rendah menjadi faktor pembatas bagi masyarakat Pulau Lirang untuk meningkatkan kualitas perumahan mereka.

### 3.2.5. Infrastruktur pendidikan

Distribusi jumlah sekolah, siswa dan guru menurut klasifikasinya di Pulau Lirang dinyatakan pada **Tabel 2**. Distribusi sekolah dan tenaga pengajar yang ditunjukkan menggambarkan bahwa masih ada kebutuhan-kebutuhan pengembangan ke depan. Jumlah infrastruktur sekolah untuk tingkatan SMK secara khusus, menunjukkan bahwa pembangunannya masih harus dilakukan karena alokasi penggunaan ruang belajar masih secara bersama dengan pendidikan tingkat SMP.

**Tabel 2.** Jumlah sekolah, siswa dan guru di pulau Lirang

No.	Nama Desa	Jumlah Sekolah			Jumlah Siswa			Jumlah Guru		
		SD	SMP	SMK	SD	SMP	SMK	SD	SMP	SMK
1.	Ustutun	1	1	1	147	95	32	4(*)3(**)	3(*)5(**)	4(*)5(**)
2.	Manoha	1	-	-	97	-	-	3(*)3(**)	-	-
Jumlah		2	1	1	244	95	32	13	8	9

Keterangan: (\*) jumlah guru PNS; (\*\*) jumlah guru honor

memiliki ketersediaan biaya investasi untuk memenuhi kebutuhan listrik melalui hasil penjualan ikan yang dilakukan selama ini.

Kondisi terbatas dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik seringkali menjadi bahan pembandingan antara masyarakat pulau Lirang dengan Timor Leste dengan memberikan pernyataan: *"Walaupun Timor Leste baru merdeka, namun kondisi mereka masih lebih baik dari masyarakat Pulau Lirang. Jika masyarakat Timor Leste dapat menikmati suasana terang benderang di malam hari, maka masyarakat Pulau Lirang hanya mampu menikmati kegelapan di malam hari, sementara terang benderang hanya menjadi tontonan masyarakat Pulau Lirang"*.

Kondisi dan pernyataan seperti di atas memberikan konsekuensi tentang pentingnya perhatian serius dari pemerintah Indonesia serta pemerintah Propinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Barat Daya dalam mengakomodasi pembangunan jaringan listrik untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat Pulau Lirang.

### 3.2.3. Sarana air bersih

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat Lirang hanya dapat memanfaatkan sumur galian yang dikembangkan melalui swadaya masyarakat. Hasil identifikasi lapangan menunjukkan jumlah sumur galian yang ada di Pulau Lirang berjumlah 18 unit. Sumber air bersih ini selalu dimanfaatkan untuk seluruh kebutuhan, baik untuk air minum, mandi, maupun cuci. Hasil wawancara lapangan menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi pemenuhan kebutuhan air minum, sebenarnya kualitas air bersih tidak terlalu baik digunakan karena umumnya air bersih dari sumur galian ini adalah payau. Namun demikian, kondisi ini tetap menjadi pilihan utama karena tidak ada sumber air bersih lainnya di Pulau Lirang.

### 3.2.4. Sarana pemukiman

Sebagian besar rumah masyarakat Lirang termasuk dalam kategori non permanen. Dalam kategori rumah non permanen ini, jenis lantai yang umum dimiliki adalah lantai tanah, jenis dinding rumah adalah terbuat dari papan, bambu, atau rumput

### 3.2.6. Infrastruktur kesehatan

Masyarakat Pulau Lirang hanya memiliki satu buah puskesmas yang terletak di Ustutun dan merupakan pusat kecamatan. Jika harus mengandalkan rumah sakit, masyarakat terpaksa harus menempuh jarak yang cukup jauh ke pusat Kabupaten atau ke wilayah lain di luar Maluku Barat Daya seperti di Kupang (Propinsi Nusa Tenggara Timur) atau menjangkau pelayanan kesehatan yang lebih dekat pada Negara tetangga Timor Leste, khususnya di Pulau Atauro. Jumlah pegawai pada puskesmas Ustutun 5 orang, jika dibandingkan dengan penduduk Pulau Lirang (1.357 orang) maka dengan kapasitas peralatan dan jumlah medis yang sedikit, tidak mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Masalah yang sering dialami masyarakat Lirang adalah karena faktor biaya, jarak dan transportasi. Meskipun sudah ada puskesmas pembantu, namun pada kenyataannya belum semua desa/masyarakat terlayani. Dampak dari jarak yang jauh ke puskesmas menyebabkan banyak masyarakat yang tidak terlayani dengan baik dan berujung pada kematian. Dengan demikian, puskesmas merupakan sarana fasilitas kesehatan yang sangat diandalkan bagi masyarakat perbatasan.

## 3.3. Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan

Untuk menganalisis kebijakan pengembangan dan merumuskan strategi pengembangan kawasan perbatasan, digunakan Analisis Kebijakan Publik (Dunn, 2003). Tujuan dari analisis ini untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan (kebijakan pemerintah pusat maupun daerah), menghasilkan keputusan pemerintah untuk merespon tekanan-tekanan, kemudian diambil tindakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

### 3.3.1. Masalah kebijakan

Masalah kebijakan (keadaan yang melatarbelakangi peristiwa yang menyebabkan timbulnya masalah kebijakan) misalnya tuntutan, keinginan, tantangan dan peluang masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan baru. Setiap kebijakan yang

akan diputuskan oleh pemilik wewenang (pemerintah) diberbagai instansi terkait di Maluku Barat daya (Badan Pengelola Perbatasan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dll) terus mengalami masalah dalam penerapan kebijakan. Berikut ini disajikan permasalahan yang menonjol berdasarkan urusan pemerintahan di Kabupaten Maluku Barat Daya, khususnya pulau Lirang antara lain:

- Belum jelasnya garis batas wilayah antara Indonesia dengan Negara tetangga.
- Rendahnya ketahanan pangan masyarakat.
- Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi.
- Rendahnya akses masyarakat terhadap sumber permodalan.
- Rendahnya akses terhadap informasi pasar termasuk promosi potensi unggulan daerah guna menarik investor.
- Belum meratanya pembangunan di ibukota kecamatan untuk merangsang pertumbuhan kawasan.
- Maraknya pencurian sumberdaya alam di wilayah perbatasan.
- Tingginya sirkulasi barang dan jasa di wilayah perbatasan.
- Masih rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai di wilayah perbatasan.

### 3.3.2. Hasil kebijakan

Hasil kebijakan pemerintah yang dirumuskan dalam program-program, dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Barat Daya, khususnya kawasan perbatasan antara lain:

- Mempercepat penyelesaian garis batas antar Negara dengan Negara tetangga.
- Menata dan membuka keterisolasian dan ketertinggalan kawasan perbatasan dengan meningkatkan sarana dan prasarana.
- Meningkatkan pengelolaan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, nasional dan internasional.
- Meningkatkan penegakan hukum, pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi.
- Program peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
- Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan.
- Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut.
- Program pengembangan perikanan tangkap dan budidaya perikanan.
- Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

### 3.3.3. Kinerja kebijakan

Dari keseluruhan kebijakan, hanya 35% program kerja yang terlaksana sesuai target yang ditentukan. Hal ini disebabkan

karena masalah-masalah yang dihadapi pemerintah daerah, dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi pemerintah, ternyata masih ada peluang besar yang perlu dikembangkan di Pulau Lirang. Peluang tersebut dapat dilihat pada analisis SWOT berikut ini:

### 3.3.4. Masa depan kebijakan

Berdasarkan data yang di peroleh, baik data primer maupun sekunder maka disusun sebuah matriks potensi dan masalah di kawasan perbatasan Lirang sebagaimana tampak pada **Tabel 3.** dan **Tabel 4.**

**Tabel 3.** Matriks lingkungan strategis (SWOT)

Faktor Internal	
<b>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</b>	<b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Pulau Lirang merupakan salah satu kawasan perbatasan Negara Kesatuan RI dengan RDTL.</li> <li>Memiliki potensi sumberdaya alam seperti kebun kelapa, jagung, perternakan, potensi kelautan dan perikanan yang cukup melimpah.</li> <li>Tersedianya jumlah nelayan yang memadai.</li> <li>Adanya kearifan lokal (sasi).</li> <li>Memiliki kebudayaan yang unik dan sama dengan Negara tetangga.</li> <li>Memiliki POS Angkatan Laut dan BKO.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum jelasnya garis batas wilayah antara Indonesia dengan RDTL.</li> <li>Kualitas sumberdaya nelayan rendah.</li> <li>Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap.</li> <li>Rantai/jaringan pasar belum baik.</li> <li>Terbatasnya kelembagaan dan aparat keamanan.</li> <li>Rendahnya infrastruktur ekonomi.</li> </ol>
Faktor Eksternal	
<b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b>	<b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki hubungan kekerabatan dengan Negara tetangga.</li> <li>Memiliki sumberdaya pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan yang dapat dikelola dan diekspor ke luar pulau bahkan ke Negara tetangga.</li> <li>Memiliki tempat-tempat pariwisata yang cukup strategis.</li> <li>Kebijakan pemerintah melalui Undang-undang Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masalah garis batas zona ekonomi eksklusif.</li> <li>Infiltrasi dan imigrasi gelap melalui kegiatan pariwisata.</li> <li>Ketidakstabilan persediaan dan harga barang keperluan masyarakat.</li> <li>Dampak negatif akibat kurangnya infrastruktur ekonomi.</li> </ol>

Hasil analisis yang menunjukkan adanya interaksi antara seluruh komponen lingkungan internal dan eksternal dan dapat menghasilkan strategi pengembangan kawasan perbatasan Pulau Lirang. Hasil analisis ini menunjukkan sedikit terdapat 15 strategi pengembangan, sebagaimana di bawah ini:

#### STRATEGI (S-O)

- Meningkatkan kerjasama pembagunan di bidang ekonomi.
- Optimalisasi usaha di bidang perikanan, dan maksimalkan pengembangan wilayah.
- Meningkatkan kemandirian nelayan melalui dukungan sarana penangkapan ikan dan pelatihan bagi nelayan.
- Penetapan undang-undang perbatasan Negara.

#### STRATEGI (S-T)

- Meningkatkan ketahanan wilayah nasional.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi secara selektif dan bertahap.
- Pemberdayaan kelembagaan adat masyarakat perbatasan dalam fungsi pengawasan.
- Membangun sarana dan prasarana pengawasan serta keamanan di kawasan perbatasan Lirang.

**STRATEGI (W-O)**

1. Percepatan penyelesaian tapal batas.
2. Peningkatan sumberdaya nelayan melalui pembinaan, pelatihan dan magang, guna meningkatkan ketrampilan dan penguasaan teknologi.
3. Peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana ekonomi dan pendukung usaha perikanan tangkap.
4. Membangun jaringan pemasaran guna mendekatkan pasar dengan sumber produksi.

**STRATEGI (W-T)**

1. Membangun pos-pos keamanan di kawasan perbatasan dan meningkatkan frekuensi patroli keamanan di kawasan perbatasan.
2. Peningkatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat di kawasan perbatasan.
3. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan.

**3.3.5. Aksi kebijakan**

Aksi kebijakan yang dimaksudkan adalah arahan-arahan pengembangan kawasan perbatasan pulau Lirang yang berbasis pada seluruh rumusan strategi yang dihasilkan dari rumusan strategi di atas.

Arahan-arahan yang terkait dengan strategi pemanfaatan potensi atau kekuatan dalam memanfaatkan peluang yang ada meliputi empat strategi dengan berbagai arahan pengembangannya. *Pertama*, meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan keamanan dengan Timor Leste. Arahannya adalah pengembangan kawasan perbatasan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kerjasama dengan Negara tetangga. *Kedua*, Optimalisasi usaha di bidang perikanan, dan maksimalkan pengembangan wilayah, melalui peningkatan kapasitas usaha penangkapan ikan dengan menambah alat tangkap yang ramah lingkungan sesuai dengan karakteristik dan potensi sumberdaya yang ada, dan mengembangkan wilayah dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada. *Ketiga*, meningkatkan kemandirian nelayan melalui dukungan sarana penangkapan ikan dan pelatihan-pelatihan bagi nelayan dan melalui dukungan modal usaha. *Keempat*, Penetapan undang-undang perbatasan Negara bertujuan untuk menekankan pengembangan wilayah perbatasan dan menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional.

Kelompok arahan pengembangan yang didasarkan pada strategi penggunaan kekuatan untuk menghadapi ancaman atau tantangan. Hasil ini memberikan konsekuensi terhadap beberapa kelompok arahan pengembangan. *Pertama*. Meningkatkan ketahanan wilayah nasional dengan arahan peningkatan ketahanan wilayah nasional masyarakat di perbatasan agar tidak mengalami penurunan wawasan kebangsaan dan rasa bela Negara. *Kedua*. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi secara selektif dan bertahap. Arahannya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan sarana prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. *Ketiga*. Pemberdayaan kelembagaan adat masyarakat perbatasan dalam fungsi pengawasan. Arahannya adalah melibatkan kelembagaan yang ada di kawasan perbatasan Lirang, baik dalam pelatihan-pelatihan maupun pelaksanaan program-program terkait kawasan perbatasan. *Keempat*. Membangun sarana dan prasarana pengawasan serta keamanan di Kawasan perbatasan Lirang. Arahan pentingnya adalah memperketat pengamanan dan pengawasan

**Tabel 4.** Analisis faktor internal dan eksternal

Faktor-faktor Strategi Internal	SP	K	SP x K	Bobot
<b>Kekuatan (Strengths)</b>				
1. Pulau Lirang merupakan salah satu kawasan perbatasan Negara Kesatuan RI dengan RDTL	4	4	16	16/76=0,2
2. Memiliki potensi sumberdaya alam seperti kebun kelapa, jagung, perternakan, potensi kelautan dan perikanan yang cukup melimpah	4	4	16	16/76=0,2
3. Tersedianya jumlah nelayan yang memadai	3	4	12	12/76=0,1
4. Adanya kearifan lokal (sasi)	2	4	8	8/76=0,1
5. Memiliki kebudayaan yang unik dan sama dengan Negara tetangga	4	4	16	16/76=0,2
6. Memiliki POS Angkatan Laut dan BKO (Bawah Kendali Operasi)	2	4	8	8/76=0,1
Total			76	0,9
<b>Kelemahan (Weaknesses)</b>				
1. Belum jelasnya garis batas wilayah antara Indonesia dengan RDTL	1	4	4	4/52=0,07
2. Kualitas sumberdaya nelayan rendah	2	4	8	8/52=0,1
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap	2	4	8	8/52=0,1
4. Rantai/jaringan pasar belum baik	2	4	8	8/52=0,1
5. Terbatasnya kelembagaan dan aparat	2	4	8	8/52=0,1
6. Rendahnya infrastruktur ekonomi	1	4	4	4/52=0,07
Total			40	0,54
<b>Peluang (Opportunities)</b>				
1. Memiliki hubungan kekerabatan dengan Negara tetangga	4	4	16	16/92=0,1
2. Memiliki sumberdaya pertanian, perkebunan,perternakan dan perikanan yang dapat dikelola dan diekspor ke luar pulau bahkan ke Negara tetangga	3	4	12	12/92=0,1
3. Memiliki tempat-tempat pariwisata yang cukup strategis	4	4	16	16/92=0,1
4. Kebijakan pemerintah melalui Undang-undang nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar	4	4	16	16/92=0,1
Total			60	0,4
<b>Ancaman (Threats)</b>				
1. Masalah garis batas zona ekonomi eksklusif	1	4	4	4/40=0,1
2. Infiltrasi dan imigrasi gelap melalui kegiatan pariwisata	2	4	8	8/40=0,2
3. Ketidak stabilan persediaan dan harga barang keperluan masyarakat	2	4	8	8/40=0,2
4. Dampak negatif akibat kurangnya infrastruktur ekonomi.	1	4	4	4/40=0,1
Total			24	0,6

terhadap para pelaku penyelundupan dan kegiatan-kegiatan ilegal lainnya di wilayah perbatasan.

Kelompok arahan pengembangan yang berbasis pada upaya mereduksi kelemahan untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan peluang. *Pertama*. Percepatan penyelesaian tapal batas, dengan arahan mempertegas kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia di wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste maupun Australia. *Kedua*. Peningkatan sumberdaya nelayan melalui pembinaan, pelatihan dan magang, guna meningkatkan ketrampilan dan penguasaan teknologi teknologi dalam rangka pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang tersedia. *Ketiga*. Peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana ekonomi pendukung usaha perikanan tangkap seperti jaringan listrik, air, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan, pasar, dermaga/jeti, pangkalan pendaratan ikan (PPI), pabrik es, cold storage dan air bersih dalam menunjang proses dan kelancaran usaha perikanan tangkap. *Keempat*. Membangun jaringan pemasaran guna mendekatkan pasar dengan sumber produksi, disamping peningkatan sarana transportasi antar pulau melalui laut dan darat.

Kelompok arahan pengembangan dengan mereduksi kelemahan dan menghindari ancaman. *Pertama*, peningkatan frekuensi patroli keamanan di kawasan perbatasan bertujuan untuk keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan. Arahannya adalah membangun pos-pos keamanan dan peningkatan armada patroli yang dimiliki, serta prasarana pengamanan dan pengawasan perbatasan seperti pos perbatasan, imigrasi, bea cukai, dan pos keamanan di pulau-pulau terluar sebagai pintu gerbang NKRI dengan Negara tetangga. *Kedua*. Peningkatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat di kawasan perbatasan agar meningkatkan rasa kecintaan dan bela Negara terhadap bangsa. *Ketiga*. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan. Arahannya adalah memperluas ketersediaan sarana dan prasarana dilakukan dengan memperbanyak sarana dan prasarana maupun meningkatkan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana yang sudah ada.

#### 4. Simpulan

Secara umum nelayan Lirang sebagai nelayan perbatasan memiliki tingkat kesejahteraan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan subsistennya dan mempunyai potensi untuk mengkonsumsi kebutuhan sekunder atau tersiernya, atau menabung dalam bentuk investasi barang. Beberapa kebijakan yang turut mendukung pengembangan Pulau Lirang sebagai Pulau kecil perbatasan, antara lain: (a) Terwujudnya keutuhan

dan kedaulatan wilayah Negara yang ditandai dengan kejelasan dan ketegasan batas-batas wilayah Negara; (b) Menurunnya kegiatan ilegal dan terpeliharanya lingkungan hidup di kawasan perbatasan; (d) Meningkatnya kualitas infrastruktur ekonomi dan perikanan; (e) Meningkatnya kualitas ekonomi masyarakat perbatasan yang ditandai dengan menurunnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya pendapatan nelayan. Rumusan strategi yang sangat penting dalam pengembangan Pulau Lirang adalah: (a) Peningkatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat di kawasan perbatasan; (b) Optimalisasi usaha di bidang perikanan dan maksimalkan pengembangan wilayah; (c) Meningkatkan kerjasama pembangunan dibidang sosial dan ekonomi, dengan negara tetangga.

#### Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

#### Referensi

- Anonimous. 1994. Tahap tahap Pembuatan Kebijakan Publik Menurut William Dunn. Available at: <http://dinamikakebijakanpublik.blogspot.com/2011/10/tahap-tahap-pembuatan-kebijakan-publik.html>. 08-03-2013. [online].
- Andrian, R., Maulana, F.: & Rizki, A.W., 2014. Analisis Nilai Tukar Nelayan (NTN) Pelagis Besar Tradisional. Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Dunn, W.N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Far-far, R., 2010. Model Pencegahan Perikanan Ilegal Melalui Pengelolaan Pulau-pulau Terluar: Pulau Lirang, Wetar dan Lirang di Provinsi Maluku. [Disertasi]. Institut Pertanian Bogor.
- Nugroho, I., 2012. Wilayah Perbatasan dan Daya Saing Ekonomi. Available at: <http://widyagama.ac.id/iwan-nugroho/2012/09/wilayah-perbatasan-dan-daya-saing-ekonomi/> 05-03-2013. [online].
- Rangkuti, F., 2006. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk menghadapi Abad 21. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ustriyana, 2006. Model dan Pengukuran Nilai Tukar Nelayan (Kasus Kabupaten Karangasem). Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Udayana.

Femysy Kour, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Sains, Teknologi dan Kesehatan, Universitas Hein Namotemo, Jln. Kompleks Pemerintahan Vak-1, Tobelo, 97762, Email: kourfemysy@ymail.com

URL Google Scholer: <https://scholar.google.co.id/citations?user=Un3ZqXwAAAAJ&hl=en&oi=ao>

URL Sinta Dikti: <http://sinta2.nistekdikti.go.id/authors/detail?id=6078138&view=overview>

#### How to cite this article:

F. Kour. 2018. Kajian ekonomi dan kebijakan pengelolaan Pulau Lirang, Maluku Barat Daya. *Akuatikisile: Jurnal Akuakultur, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, 2(1): 22-29. <https://doi.org/10.29239/j.akuatikisile.2.1.22-29>